

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasar sebagai suatu sistem memiliki berbagai wajah yang selama ini sering saling mendahului baik dalam pemahaman konseptualnya maupun dalam konteks peletakannya sebagai suatu institusi. Secara konseptual, sistem pasar mengacu kepada mekanisme interaksi antara permintaan dan penawaran yang mengarah kepada nilai tambah yang paling efisien. Konsep ini lebih tepat ditujukan bagi istilah mekanisme pasar yang mendasarkan asumsi pada kesetaraan tawar-menawar, sebagai institusi pasar merupakan suatu bangunan sosial dari masyarakat yang menggabungkan lebih banyak variabel diluar permintaan dan penawaran itu sendiri seperti ideologi, tujuan politik, adat istiadat, nilai-nilai agama dan lain sebagainya. (Hamzah, 2011 : 219).

Pasar merupakan salah satu unsur penting yang dapat menjadi potensi perkembangan perekonomian pada suatu daerah. Pasar dapat dikatakan sebagai lapangan pekerjaan terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh semua jenis kalangan masyarakat, masyarakat dengan ekonomi kelas atas ataupun masyarakat dengan ekonomi kelas bawah. Dalam arti setiap orang dapat masuk dan bergabung didalam pasar untuk mengambil peran dalam dunia perdagangan, pemberian jasa, dan sebagainya (Hadi, 2015). Secara umum pasar dapat diartikan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan jual beli barang dan jasa dengan sejumlah penjual yang berkumpul lebih dari satu. Pasar tidak dapat dipisahkan dari kehidupan

masyarakat, melalui pasar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya (Mustafa, 2017).

Pasar sebagai penunjang ekonomi masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam mendukung proses pembangunan. Pemerintah selaku representasi politik bertugas mengatur stabilitas kelembagaan ekonomi termasuk pasar. Seperti yang kita ketahui, kehidupan masyarakat yang majemuk memiliki hubungan erat dengan segala aktivitas sosial ekonomi yang saling berkesinambungan. Dengan demikian, kondisi tersebut bergantung pada segala usaha pemerintah dalam perencanaan dan pengelolaan pasar.

Kebijakan pemerintah dalam mengelola pasar tradisional tidak terlepas dari koordinasi bersama para stakeholder. Tujuannya agar dapat memberikan hasil yang menguntungkan bagi seluruh pihak. Kotler mendeskripsikan pasar sebagai sektor yang berpengaruh pada pembangunan dan berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui penarikan pajak serta retribusi (Juliarta, 2016). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 menegaskan jika penataan pasar tradisional yang diatur menurut tata ruang wilayah Kabupaten/Kota harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, menyediakan fasilitas umum yang bersih, higienis, aman, dan tertib. Penataan ulang atau rekonstruksi pasar tradisional memerlukan strategi terstruktur untuk mewujudkan manfaat pembangunan yang jangka panjang. Di samping itu, konsep pembangunan umumnya berorientasi pada perencanaan dengan sistem partisipatif, yaitu perencanaan yang melibatkan rakyat dalam proses pembangunan daerah.

Pasar Baru merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Probolinggo. Letak bangunannya langsung berada di pinggir jalan raya, sehingga ada pedagang yang berjualan di bahu jalan. Ditambah lagi dengan minimnya lahan parkir, sehingga banyak kendaraan yang diparkir sembarangan. Hal tersebut memicu terjadinya kemacetan di sepanjang jalan yang ada di depan pasar tersebut. Terlebih pada pagi hari pada jam berangkat bekerja dan sekolah, kemacetan menjadi parah dan sulit untuk ditertibkan. Selain sering menyebabkan kemacetan, pasar lama juga tidak mampu lagi menampung pedagang yang terlampaui banyak, sedangkan pasar lama tidak mungkin dapat diperluas karena keterbatasan lahan.

Relokasi yang dilakukan terhadap Pasar Baru memiliki tujuan lain yaitu agar pasar ini tidak ditinggalkan para konsumen karena penataan lokasi yang kurang optimal serta diharapkan dengan pemindahan lokasi pasar ke tempat yang lebih strategis ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan daya tampung pedagang serta pembeli. Peningkatan daya tampung tersebut diharapkan dapat membantu pedagang Pasar Baru agar dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan kesejahteraan pedagang.

Penataan pasar tradisional termasuk salah satu proses pembangunan yang dapat memicu konflik. Saat pembangunan berlangsung, terjadi perubahan sosial di mana peran-peran sosial tergantikan dan menyebabkan adanya perubahan perilaku pada aspek kehidupan (Legowo, 2018). Pembangunan pasar tradisional membawa dampak tersendiri khususnya bagi pedagang karena mereka belum tentu mendapatkan keuntungan dari adanya pembangunan tersebut. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang tertuang dalam suatu peraturan tidak jarang justru

mengabaikan hak masyarakat dan melahirkan ketidakadilan (Nasir, 2017). Perbedaan kepentingan antar elemen di dalam pasar yaitu pedagang dan pemerintah menjadi faktor pendorong terjadinya konflik. Kerja sama antar kedua pihak tersebut dibutuhkan untuk membangun pondasi perekonomian pasar yang dapat menghasilkan manfaat bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Apabila kerja sama antar elemen tersebut kian menurun, maka kemungkinan terjadinya perselisihan akan semakin besar.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan Irvan Afrinaldo (2017), “Analisis Konflik Antara Pedagang Pasar Atas Dengan Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Pasar Atas Bukittinggi Pasca Kebakaran Tahun 2017” dianalisis dengan teori tahapan konflik Simon Fisher dan metode kualitatif untuk mengidentifikasi konflik pembangunan pasar.

Siti Musrifah, dkk., (2017). “Dinamika dan Konflik dalam Proses Relokasi Pedagang Pasar Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara” menghasilkan temuan penelitian yaitu pemerintah serta pengurus relokasi memegang kepentingan dalam upaya mencanangkan ketertiban, sementara pewakaf lahan pasar lama, pedagang, dan juga masyarakat pun mempunyai masing-masing kepentingan.

Moch. Syahrul Alamsyah (2017), “Dinamika Konflik Revitalisasi dan Relokasi Pedagang Pasar Tradisional Dinoyo Kota Malang” menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf dan metode kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab konflik dalam relokasi pedagang Pasar Dinoyo Kota Malang. Hasil pembahasannya menunjukkan jika konflik disebabkan oleh kebijakan Pemerintah

Kota Malang memutuskan perjanjian sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak lain.

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pasar, pemerintah Kota Probolinggo menerapkan kebijakan berupa revitalisasi. Salah satu bentuk kebijakan revitalisasi pasar adalah relokasi yaitu pemindahan lokasi pasar dari satu tempat ke tempat yang lain.

Dalam proses relokasi ini tidak sepenuhnya berjalan seperti apa yang diharapkan. Ada sebagian pedagang yang mau menerima keputusan pemerintah setempat untuk pindah ke pasar baru dan ada pula sebagian pedagang yang kukuh untuk tidak mau pindah ke pasar baru. Para pedagang yang tidak mau pindah ke pasar baru ini dikarenakan beberapa hal diantaranya lokasi jualannya diganti dan ukurannya berkurang.

Penolakan pemindahan lokasi inilah memicu munculnya konflik di antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam proses relokasi pedagang Pasar Baru. Proses relokasi pedagang Pasar Baru juga menimbulkan dampak-dampak bagi masyarakat Pasar Baru. Dari uraian mengenai proses relokasi pedagang Pasar Baru tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai proses relokasi pedagang pasar tersebut dalam penelitian yang berjudul **“Dinamika dan Konflik dalam Proses Relokasi Pedagang Pasar Baru Kecamatan Kanigaran Probolinggo.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan berbagai kepentingan yang terjadi dalam proses relokasi pedagang Pasar Baru Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan berbagai kepentingan yang terjadi dalam proses relokasi pedagang Pasar Baru Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Mengetahui perbedaan berbagai kepentingan, dampak sosial dan ekonomi relokasi pasar terhadap pedagang Pasar.
  - b. Sebagai salah satu bahan kajian dalam Studi Ilmu Administrasi Negara terutama tentang “Dinamika dan Konflik dalam Proses Relokasi Pedagang Pasar Baru Kecamatan Kanigaran Probolinggo”.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Pengelola, hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan guna bisa mengambil langkah yang tepat dalam proses pengembangan.

- b. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama kuliah.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, disusun sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi Aplikasi Inlislite dan pelayanan.

##### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan variabel penelitian, metode pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian, dan prosedur analisis data.

##### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai Dinamika dan Konflik dalam Proses Relokasi Pedagang Pasar Baru Kecamatan Kanigaran Probolinggo.

##### **BAB V KESIMPULAN**

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian.